



Komunikasi Penyuluhan Badan Pangan Nasional (BPN) Melalui *Ecological Citizenship* dalam Mendorong Ketahanan Pangan di Sumatera Utara

Maulana Andinata Dalimunthe^{1*}, Muhammad Lutfi Habibi², Aulia Rahma Ritonga³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

²Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

³Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan hal yang amat penting. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang esensial dan amat fundamental bagi manusia dalam memenuhi, serta mempertahankan kehidupannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kegiatan komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai bagian dari pemerintah dalam mewujudkan *ecological citizenship* dan meningkatkan indeks ketahanan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus guna menganalisis kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) dalam mewujudkan *ecological citizenship* dan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan yang berlandas pada tiga pilar (ketersediaan, Keterjangkauan, pemanfaatan) memiliki koherensi yang pada dasarnya dapat dicapai dengan mengutamakan pelestarian lingkungan. Kegiatan penyuluhan dengan konsep *ecological citizenship* berperan penting sebab menggunakan model *bottom up*, yakni melalui model serta masyarakat secara langsung. Melalui konsep *ecological citizenship* pemerintah tidak sekedar mengatasi permasalahan ketahanan pangan, namun secara beriringan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Optimalisasi *ecological citizenship* dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dilakukan melalui intensitas penyuluhan yang jelas dan efektif dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan humanis, seperti penyuluhan dengan berdasar pada pengetahuan kesehatan, serta pemeliharaan lingkungan yang merata.

Kata Kunci: Komunikasi Penyuluhan, Ecological Citizenship, Ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional

Abstract

Food security for a country is a very important thing. Food is a basic need that is essential and very fundamental for humans to fulfill and maintain their life. This study aims to see how extension communication activities are carried out by the National Food Agency (BPN) as part of the government in realizing ecological citizenship and increasing the national food security index. This study uses a case study approach to analyze extension activities carried out by the National Food Agency (BPN) in realizing ecological citizenship and food security. The results of the research show that food security based on three pillars (availability, affordability, utilization) has coherence which basically can be achieved by prioritizing environmental preservation. Extension activities with the concept of ecological citizenship play an important role because they use a bottom-up approach, namely through direct community participation. Through the concept of ecological citizenship, the government does not just solve food security problems, but simultaneously can protect the environment. Optimization of ecological citizenship in increasing national food security is carried out through clear and effective counseling intensity by prioritizing sustainability and humanist principles, such as counseling based on health knowledge, as well as maintenance of an equitable environment.

Keyword: Extension Communication, Ecological Citizenship, Food Security, National Food Agency

How to Cite: Dalimunthe, Maulana A., Ritonga, A., & Ananda, S. (2023). Komunikasi Penyuluhan Badan Pangan Nasional (BPN) Melalui Ecological Citizenship dalam mendorong Ketahanan Pangan di Sumatera Utara. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 2 (2):8-14

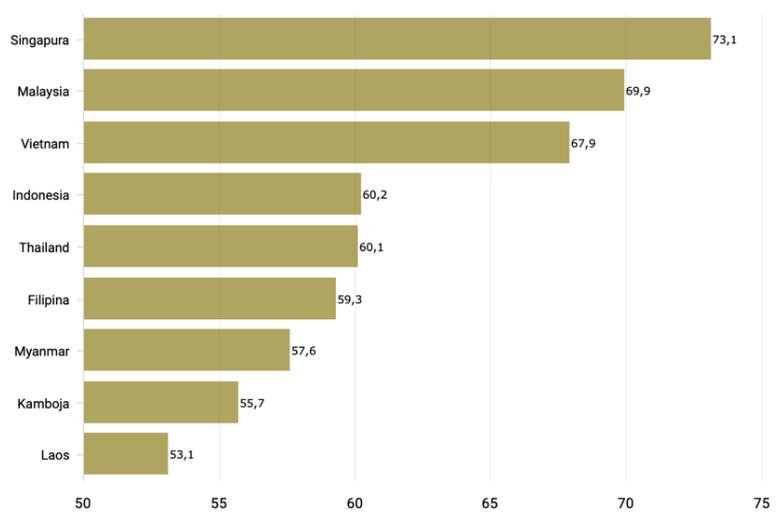
*Corresponding author: Maulana Andinata Dalimunthe

E-mail: maulanaandinatad@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan yang amat fundamental dan mendasar bagi manusia dalam memenuhi, serta mempertahankan kehidupannya. Pembangunan pangan di Indonesia memiliki keterkaitan yang amat erat dengan perwujudan ketahanan pangan, seperti yang dituangkan pada Undang-Undang pangan No. 7 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002. Kebijakan tersebut membahas mengenai ketahanan pangan secara spesifik (Suandi, 2012). Bagi sebuah negara, ketahanan merupakan suatu hal yang amat penting, tidak terkecuali Indonesia. Menurut (Andini, 2017) ketahanan pangan pada tataran nasional harus mampu menjangkau jumlah, kualitas, dan harga yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di pedesaan. Hal ini diakibatkan basis dasar yang menjadi konsep ketahanan pangan yang terfokus dan secara khusus berada di pedesaan. Selain itu, ketahanan pangan adalah pilar utama hak asasi manusia sebagai upaya pemenuhan oleh karena itu harus terpenuhi secara berkesinambungan.

Merujuk data yang dihimpun oleh *Global Food Security Index (GFSI)*, indeks ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2022 berada pada indeks 60,2. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2022 masih cukup rendah dan berada di bawah rata-rata global dengan indeksasi 62,2. Indeks ketahanan pangan Indonesia juga tidak terlalu baik di Kawasan Asia Pasifik, yang rata-rata indeksnya 63,4 (Ahdiat, 2022). Dalam menilai indeks tersebut, GFSI menggunakan beberapa indikator yang dapat merefleksikan ketahanan dan kerentanan pangan di suatu daerah, seperti *affordability* atau keterjangkauan terhadap pangan, *availability* atau ketersediaan pangan di pasar, *quality* dan *safety* atau kualitas dan keamanan yang dimiliki oleh suatu sumber pangan, serta *natural resources* dan *resilience*, atau ketahanan alam dan sumber daya yang ada pada suatu daerah (Devi et al, 2020).



Grafik 1. Indeks Ketahanan Pangan Negara ASEAN (dalam Ahdiat, 2022)

Strategi utama dalam mendorong terciptanya masyarakat yang berkualitas di Indonesia, sangat berkaitan erat dengan keadaan pangan dan sumber gizinya. Terpenuhinya kecukupan pangan dan gizi dapat dilihat dari tingkat pencapaian pangan yang disediakan dan yang dikonsumsi terhadap jumlah pangan dan gizi yang tersedia, serta mutu maupun keragamannya. Keadaan ini senada dengan arah pengembangan sistem ketahanan pangan melalui keberagaman bahan pangan sebagai sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal (Dalimunthe et al, 2023). Pengembangan sistem

ketahanan pangan tersebut menjamin ketersediaan pangan dan mutu, serta nutrisi dalam jumlah yang sesuai dengan harga yang berdasar pada pendapatan masyarakat dan peningkatan produksi (Hanafie, 2010). Hal ini berkaitan dengan permasalahan umum mengenai ketahanan pangan yang amat bersinggungan dengan pertumbuhan dan jumlah penduduk yang besar (Rusdiana, S & Maesya, A, 2017).

Terdapat tiga pilar indikator yang mendorong kesuksesan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkesinambungan, yakni: seperti apa ketersediaan yang ada pada suatu daerah terkait kebutuhan pangan, bagaimana akses yang tersedia dalam memperoleh pangan, terakhir, pemanfaatan seperti apa yang dapat diperoleh dari pangan (Fauzi et al, 2019). Guna mendorong tiga pilar indikator tersebut, dibutuhkan keseriusan dan sinergitas antara pemerintah, hingga masyarakat. Pada satu sisi pemerintah tidak sekedar dituntut untuk merumuskan kebijakan tetapi juga mensosialisasikan kebijakan tersebut, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait tindakan yang harus dilakukan dalam mewujudkan dan mendukung ketahanan pangan tersebut. Sementara itu di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran dan tindakan yang nyata dalam mendukung kebijakan dan program-program pemerintah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Rusdy & Sunartomo (2020), bahwa kegiatan penyuluhan dalam bidang pertanian bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai ilmu, teknologi terbaru, serta informasi lainnya mengenai dalam rangka mensukseskan program pembangunan yang sebelumnya telah ditentukan.

Kegiatan komunikasi penyuluhan memiliki peranan sentral membangkitkan kesadaran dan mendorong tindakan masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah, seperti program *food security* atau ketahanan pangan. Salah satu peran sentral masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui *Ecological citizenship* atau kewarganegaraan ekologis. Konsep kewarganegaraan ekologis menjelaskan bahwa masyarakat sebagai warga negara diharuskan menjaga dan melestarikan lingkungan demi keberlangsungan hidup jangka panjang (Horton, 2006). Gagasan kewarganegaraan ekologis hadir dan membawa implikasi penting dalam upaya melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan, akibat aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Kewarganegaraan ekologis menuntut kepedulian masyarakat untuk tidak mengeksploitasi lingkungan, namun mendorong pertanggung jawaban terhadap sumber-sumber alam sebagai bentuk investasi jangka panjang yang berkelanjutan (Kalidjernih, 2011; Dalimunthe et al, 2023). Sebagai salah satu bagian pemerintah, Badan Pangan Nasional (BPN) diharapkan mampu menginisiasi kewarganegaraan ekologis tersebut dengan efektif, seperti melalui kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dilihat lebih jauh bagaimana kegiatan komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai bagian dari pemerintah dalam mewujudkan *ecological citizenship* dan meningkatkan indeks ketahanan pangan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus guna menganalisis kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) dalam mewujudkan *ecological citizenship* dan ketahanan pangan. Studi kasus merupakan metode yang secara khusus menyediakan kedalaman analisis melalui analisis secara langsung serta deskripsi yang teliti mengenai sebuah peristiwa. Studi kasus digunakan dalam proses penemuan data penelitian yang hendak dilaksanakan secara komprehensif, melalui dukungan yang bersumber dari beberapa realitas empirik yang jelas. (Patton, 2009). Studi kasus sebagai model penelitian memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menentukan dan mempertahankan karakteristik inklusif yang memiliki makna dari berbagai peristiwa nyata, seperti perubahan-perubahan sosial dan organisasional (Yin, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena yang masih saja terjadi sampai hari ini ialah masih saja ditemukan pengrusakan lingkungan di berbagai daerah Indonesia yang secara tidak langsung telah merefleksikan karakter masyarakat yang belum memiliki perhatian besar pada pelestarian lingkungan. Fenomena ini pula yang pada akhirnya turut mengancam ketahanan pangan nasional. Pencemaran lingkungan melalui limbah industri pabrik, pembakaran secara liar dan brutal terhadap hutan, hingga tercemarnya bahan kimia yang secara sengaja digunakan dalam produk pertanian adalah beberapa contoh dari tindakan perusakan lingkungan tersebut. Tindakan perusakan lingkungan tersebut terjadi akibat minimnya kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga cenderung apatis dan menganggap ekspansi berlebihan yang banyak dilakukan sebagai sebuah peristiwa yang tidak penting dibandingkan peristiwa atau isu lainnya (Fatmalasari et al, 2019).

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan merupakan refleksi dari krisis ekologi yang seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama di antara masyarakat dan pemerintah guna mendorong perilaku sadar lingkungan. Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai bagian dari pemerintah telah menginisiasi beberapa program yang dapat menanggulangi krisis kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan tersebut, sehingga secara koheren mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional. Salah satu strategi yang dilakukan BPN ialah melalui kegiatan penyuluhan yang diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kesadaran warga, tetapi juga ikut berperan serta secara aktif dalam melestarikan lingkungan dan mendukung ketahanan pangan tersebut (Badan Pangan Nasional, 2021). Kegiatan penyuluhan yang digaungkan oleh BPN dalam mewujudkan ketersediaan dan ketahanan pangan dilakukan dengan memperkuat perilaku-perilaku yang berkaitan dengan karakter *ecological citizenship*, seperti keinginan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai lingkungan, kesadaran meningkatkan keterampilan lingkungan, kemauan mengubah sikap peduli lingkungan, serta bergerak aktif dengan berpartisipasi secara langsung pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan

Kegiatan penyuluhan Pemerintah melalui BPN dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan dengan mengacu pada konsep *ecological citizenship* sangat menarik. Melalui konsep *ecological citizenship* pemerintah tidak sekedar mengatasi permasalahan ketahanan pangan, namun secara beriringan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Jika dilihat secara berkesinambungan, keenganan dan ketidakmampuan dalam melestarikan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor-faktor fisik sosial, dan lingkungan, seperti kondisi iklim, sumber daya alam (tanah, air), sumber daya genetik tanaman dan hewan, yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu peran aktif warga negara (masyarakat) sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan tersebut melalui konsep *ecological citizenship*. Seperti yang diutarakan oleh Light (2001), bahwa kesadaran, tindakan, dan tanggung jawab warga amat membantu dan dapat membuat perubahan yang sangat besar dalam melestarikan lingkungan.

Pentingnya penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan warga dalam pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan juga selaras dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang salah satu agendanya ialah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketahanan pangan yang berlandas pada tiga pilar (ketersediaan, Keterjangkauan, pemanfaatan) juga memerlukan keadaan lingkungan strategis dan kondusif, yang pengelolaannya mengacu para prinsip pembangunan berkelanjutan, kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan kondisi iklim.

Berdasarkan hasil telaah BPN melalui Tim *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), salah satu indikator dalam mengukur kerentanan terhadap kerawanan pangan

kronis ialah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. Selain itu, kerentanan pangan juga dipengaruhi oleh kondisi ekosistem wilayah setempat serta faktor-faktor fisik, sosial, dan lingkungan yang ada. Faktor tersebut antara lain kondisi iklim, sumber daya alam (lahan,air), sumber daya genetik tanaman dan hewan (Badan Pangan Nasional, 2022). Jika melihat data yang dirilis tim FSVA pada tahun 2022, mengenai indeks ketahanan pangan yang dilihat melalui tiga indikator utama tersebut, menunjukkan adanya kenaikan indeks. Meskipun tidak signifikan, angka ini menunjukkan masih perlunya perhatian yang lebih dari berbagai elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dan salah satu cara yang dapat dilakukan ialah melalui penyuluhan dengan mengutamakan konsep *ecological citizenship*

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2021				2022			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
SUMATERA UTARA									
19.	Nias	88,19	67,54	46,43	65,29	87,77	73,10	54,32	69,99
20.	Mandailing Natal	82,59	75,91	49,40	67,31	78,19	76,71	49,73	66,36
21.	Tapanuli Selatan	91,45	79,43	57,25	74,16	90,75	77,83	55,28	72,68
22.	Tapanuli Tengah	71,97	75,14	65,15	70,19	76,14	75,44	63,54	70,89
23.	Tapanuli Utara	95,94	76,97	64,57	77,70	95,48	75,04	62,87	76,30
24.	Toba Samosir	96,32	78,97	71,70	81,27	96,66	78,67	75,47	82,79
25.	Labuhan Batu	74,31	84,60	67,00	74,48	71,71	85,06	71,99	75,83
26.	Asahan	62,78	84,96	74,46	74,10	58,19	84,41	72,18	71,65
27.	Simalungun	92,86	83,15	72,41	81,77	91,47	82,59	71,56	80,84
28.	Dairi	95,69	80,96	69,27	80,71	95,92	82,43	66,66	80,17
29.	Karo	98,31	77,87	75,90	83,22	97,75	76,63	70,11	80,36
30.	Deli Serdang	86,39	91,52	80,73	85,66	84,52	92,66	84,99	87,15
31.	Langkat	82,53	82,41	73,30	78,80	76,65	80,33	70,67	75,36
32.	Nias Selatan	83,80	64,26	47,81	63,54	83,67	67,40	51,20	65,80
33.	Humbang Hasundutan	94,28	75,87	61,17	75,51	94,02	79,35	64,74	77,91
34.	Pakpak Bharat	84,87	79,50	54,51	71,12	82,00	81,72	53,50	70,52
35.	Samosir	93,72	75,12	67,37	77,60	93,61	72,72	62,91	75,06
36.	Serdang Bedagai	98,18	83,46	71,84	83,23	97,50	82,50	70,32	82,13

Gambar 2. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Sumatera Utara

Optimalisasi konsep *Ecological Citizenship* pada kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BPN disampaikan dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan humanis, seperti penyuluhan dengan berdasar pada pengetahuan kesehatan melalui pembangunan, serta pemeliharaan lingkungan yang merata. Beberapa kegiatan penyuluhan tersebut di antaranya, dilakukan dengan meningkatkan fasilitas dan layanan air bersih, serta sanitasi lingkungan. BPN juga menggandeng berbagai institusi seperti Perbankan atau Kemenkeu, BUMN Pangan, Pemprov atau Pemko di setiap kegiatan penyuluhan agar kegiatan berjalan lebih efektif.

Kegiatan penyuluhan dengan konsep *ecological citizenship* berperan penting sebab menggunakan cara yang dimulai dari masyarakat (*bottom up*), yakni melalui peran serta masyarakat secara langsung (Prasetyo & Budimansyah, 2016; Ashley, 2000). Sebagaimana yang disampaikan oleh Dagger (dalam Isin & Turner, 2002) pada buku *Handbook of Citizenship Studies*, bahwa *ecological citizenship* menjadi dasar dalam membangun keseriusan terhadap kebaikan bersama dan partisipasi aktif dalam urusan pelestarian lingkungan. Keberhasilan konsep *ecological citizenship* dalam kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan ketahanan pangan juga dapat dilihat dari pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian. Dari data yang dihimpun melalui Kementerian pertanian (2022), pembangunan ketersediaan pangan strategis dalam negeri selama tahun 2021 berhasil meningkat sebesar 2,42% dari target 1,81% (kategori sangat berhasil). Penguatan *ecological citizenship* sebagai wujud ketahanan pangan harus terus digaungkan pihak terkait seperti BPN, melalui berbagai

kegiatan penyuluhan yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat. Konsep *ecological citizenship* dimulai dari tingkat yang paling dasar, yakni kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya melestarikan lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan berarti turut serta memelihara, mengelola, memulihkan, serta menjaga lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Setidaknya ada tiga pilar indikator utama yang mampu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, yaitu: Ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketiga indikator tersebut memiliki koherensi yang pada dasarnya dapat dicapai dengan mengutamakan pelestarian lingkungan, seperti yang diutarakan pada konsep *ecological citizenship*. Optimalisasi *ecological citizenship* dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dapat dilakukan melalui intensitas penyuluhan yang jelas dan efektif dari pihak terkait, seperti yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Beberapa kegiatan penyuluhan tersebut di antaranya, seperti; peningkatan fasilitas layanan air bersih dan sanitasi lingkungan. Dalam mengefektifkan kegiatan-kegiatan penyuluhan tersebut, BPN menggandeng berbagai pihak seperti; Perbankan atau Kemenkeu, BUMN Pangan, Pemprov atau Pemko. Kegiatan penyuluhan melalui konsep *Ecological citizenship* merupakan gagasan yang memiliki implikasi penting dalam upaya pelestarian lingkungan yang efektif guna menciptakan ketahanan pangan yang berkesinambungan. Selain itu, program-program kegiatan penyuluhan dengan pendekatan *ecological citizenship* juga membawa hasil positif tidak hanya pada pada bidang lingkungan dan pangan, tetapi juga pada bidang sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, Adi. (2022). Ketahanan Pangan Indonesia Tergolong Cukup Kuat di ASEAN. Databooks: Jakarta. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-tergolong-cukup-kuat-di-asean>
- Andini, B. D. (2017). *Pemetaan Ketahanan Pangan Wilayah Berdasarkan aspek Akses Pangan Di Kabupaten Bantul*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.
- Ashley, M. (2000) 'Behaviour Change and Environmental Citizenship: a case for spiritual development?', *International Journal of Children's Spirituality*, 5 (2): 131-45.
- Badan Pangan Nasional. (2022). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2022*. FSVA Nasional 2022.. <https://drive.google.com/file/d/1iRizpdbKPhMhVlaO9hwJYldGmma2opU3/view>
- Dalimunthe, M., Syam, A., & Ramadhan, A. (2023). *Food estate dalam Bingkai Media:(Analisis Framing Pada Media Online Waspada. co. id)*. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)* 2 (1), 6-12.
- Dalimunthe, M., Ohorella, N., & Nasution, N. (2023). *The Development of Urban Farming: Systematics Literature Review*. *Journal of Peasants' Rights* 2 (2), 11-16
- Devi, L., Andari, Y., Wihastuti, L., & Haribowo, K. (2020). *Model Sosial-Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 28, No. 2, 2020.
- Fatmalasari, H., Yulindari, E., & Gunawati, D. (2019). *Penguatan Ecological Citizenship Sebagai Upaya Mengubah Perilaku Masyarakat Sadar Akan Lingkungan Melalui Program Kampung Selo Beraksi*. *PKn Progresif*, Vol. 14 No. 1 Juni 2019.

- Fauzi, M., Kastaman, R., Pujiyanto, T. (2019). *Pemetaan Ketahanan Pangan Pada Badan Koordinasi Wilayah I Jawa Barat*. Jurnal Industri Pertanian, Volume 01. Nomor 01. Tahun 2019. 1-10.
- Hanafie, Rita. (2010). *Penyediaan Pangan Yang Aman Dan Berkelanjutan Guna Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan*. J-Sep Vol. 4 No.3 November 2010.
- Horton, D. 2006. Demonstrating environmental citizenship? A study of everyday life among green activists. In *Environmental Citizenship*, ed. D. Bell and A. Dobson, 127–50. Cambridge, MA and London: MIT Press.
- Isin, Engin & Turner, Bryan S. (2002). *Handbook Of Citizenship*. New Delhi: SAGE Publications.
- Kalidjernih, F. K 2011, '*Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*'. Edisi Ketiga. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kementerian Pertanian. (2022). *Data Produksi Tanaman Pangan*. Jakarta: Kementan. <https://satudata.pertanian.go.id>
- Light, Andrew. 2001. *The urban blind spot in environmental ethics*. *Environmental Politics* 10 (1), 7-35.
- Patton, Michael Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Prasetyo, W. H., & Budimansyah, D. (2016), '*Warga Negara dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun*'. Jurnal Pendidikan Humaniora, vol. 4, no. 4, hh. 177-186.
- Rusdiana, Supardi & Maesya, Aries. (2017). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Pangan Di Indonesia*. Agriekonomika Volume 6, Nomor 1, 2017 .
- Rusdy, Salman., & Sunartomo, Aryo. (2020). *Proses Komunikasi dalam Penyuluhan Pertanian Program System of Rice Intensification (SRI)*. KIRANA Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian. Vol 1(1): 1-11 .
- Suandi. 2012. *Modal Sosial Dan Pembangunan Ketahanan Pangan Berkelanjutan*. Universitas Jambi: Jambi.
- Yin, Robert K. (2006). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo: Jakarta.